



Penagihan Listrik Pemkab

Agus: PLN Jangan Terlalu Berlebihan

Johan Wahyudi

Borneo Tribune, Mempawah

Penagihan listrik yang ditujukan kepada Pemerintah Kabupaten Kubu Raya, ditanggapi Anggota DPRD Kubu Raya, Agus Darmawansyah. Ia meminta PT PLN transparansi terhadap penagihan beban listrik dan tidak terlalu berlebihan.

"Apa lagi sampai dimuat ke media. Padahal dalam proses penagihan, tentu ada mekanisme yang bisa dilakukan mulai dari penyuratan hingga pemadaman," kata Agus.

Menurutnya, sebagai Badan Usaha Milik Negara, PT. PLN dianggap mengetahui sistem penganggaran dan pembayaran yang harus dilakukan pemerintah. Dalam melakukan penagihan, PT. PLN seharusnya bisa menunjukkan berapa beban listrik yang digunakan Pemkab Kubu Raya. Karena selama dua tahun ini berdasarkan hasil pemeriksaan

“
Apa lagi sampai
dimuat ke media.
Padahal dalam
proses penagihan,
tentu ada mekanisme
yang bisa dilakukan
mulai dari
penyuratan hingga
pemadaman
”

BPK RI, pembayaran listrik yang dilakukan Pemkab Kubu Raya dinilai masih kurang baik.

"Saya rasa PT. PLN tahu betul dengan mekanisme tersebut, jadi tidak usahlah sampai mempublikasikannya kepada media, karena masih bisa dilakukan upaya-upaya lain. Hal itu dikarenakan, Pemkab Kubu Raya tidak memiliki data yang jelas terkait berapa besaran beban listrik yang di-

gunakan dan kesesuaian pembayarannya," paparnya.

Ketua Fraksi PDI Perjuangan Kabupaten Kubu Raya itu juga menilai, Pemkab setempat perlu melakukan evaluasi terhadap telatnya pembayaran listrik kepada PT PLN. Jika tidak ada evaluasi maka Pemkab Kubu Raya akan kesulitan dalam pembuatan laporan, serta masyarakat dirugikan.

"Jangan sampai pada tahun berikutnya, Pemkab terlambat lagi membayar listrik, karena itu hal yang sangat memalukan. Jika PT PLN benar-benar melakukan pemadaman listrik pada penerangan jalan umum, tentu banyak resiko yang akan dialami masyarakat. Selain kondisi jalan yang gelap pada malam hari, tentu beberapa ruas jalan yang ada di Kubu Raya menjadi rawan kriminal," ungkapnya.

Ia berharap kedua belah pihak bisa saling mengintropeksi diri dan mengutamakan kepentingan masyarakat umum. □